RENCANA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

2026

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

2025

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Induk Tahun 2026 telah diselesaikan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bagi pihak yang berkepentingan dengan senang hati kami menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dikemudian hari.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam penentuan kebijakan pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Palembang, 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. IDNRA BANGSAWAN,SH.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700509 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II. PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu 6
2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu 14
2.3 Identifikasi Masalah 15

BAB III. RENCANA KINERJA 17

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN..... 20

BAB V. PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan program yang bersentuhan dengan hajat kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya banyak faktor yang harus mendapat perhatian lebih. Khususnya pada bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dalam pelaksanaan dilapangan diperlukan perlakuan khusus dan kerjasama antar dinas. Hal ini menyangkut kehidupan tenaga kerja (buruh) beserta keluarga dan juga pengusaha (investor) untuk tetap menjaga kelangsungan produksinya.

Masih tingginya jumlah keluarga miskin di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan merupakan tantang tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja untuk memperluas lapangan kerja, kemiskinan dapat dikurangi salah satunya dengan tersedianya tenaga kerja terampil dan lapangan kerja. Selain itu upah yang diterima buruh juga memadai untuk membiaya kehidupan selama satu bulan kedepan disamping jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya serta jaminan kecelakaan kerja. Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dengan diawasinya penerapan Norma-Norma Ketenagkerjaan di perusahaan.

Pembinaan dan pembangunan ketransmigrasian dari tahun ketahun mengalami penurunan penempatan transmigran, hal ini seiring dengan meningkatnya luas perkebunan karet dan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pembinaan tranmsigrasi bagi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang belum diserahkan kepada kabupaten (UPT Serah), selain itu beberapa Dinas Transmigrasi

Kabupaten berusaha membuka lahan-lahan tidak produktif menjadi lokasi tranmsigrasi baru.

Program dan kegiatan ketenagakerjaan mendapat dukungan APBN Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan dan APBD Provinsi Sumatera Selatan, bidang ketransmigrasaian mendapat dukungan APBN Tugas Pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemanfaatan anggaran mampu memberikan *outcome* positif bagi pekerja dan masyarakat tranmsigrasi. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di provinsi dan kabupaten / kota, diperlukan laporan pelaksanaan yang memberikan informasi realisasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi. Pelaporan yang disusun dan disampaikan secara rutin juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kementerian.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan maksud untuk menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara effektif dan efisien dengan tujuan untuk :

1. Memacu atau meningkatkan semangat kerja pada setiap bidang untuk dapat bekerja dan mengelola tugas pokok dan fungsinya di satu pihak dan unsur penunjangnya di lain pihak sehingga mendapatkan suatu kinerja yang dapat diukur.
2. Mengarahkan seluruh staf pada pekerjaan - pekerjaan yang difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi yang pada gilirannya akan

dapat dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Mengkoordinasikan rencana kerja ini pada semua Dinas atau Instansi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam mengatasi kemiskinan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan ;

Bab II Perkembangan dan Permasalahan

Bab III Rencana Kinerja Tahun 2026 ;

Bab IV Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

.

2.1 EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN LALU

Capaian Renstra OPD dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan profram dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan gune mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang sesuai.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2025 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan dan penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra OPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kesadaran pengusaha dan karyawan dalam mengatasi peraturan Per Undang-Undangan Ketenagakerjaan.

2.2.1. EVALUASI PENCAPAIAN TAHUN 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI KINERJA			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**						
07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/ berkembang**	**100%**	**5.359.319.917**	**15.256.034. 223**	**21.104.356. 131**	**28.080.517. 665**
1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**28.219.589**	**55.525.257**	**83.112.857**	**27.601.784. 388**
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	6.610.907	24.093.275	29.485.275	**147.793.489**
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1			3.943.200	52.804.605
1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1			3.983.750	4.914.450
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		6.110.900	7.710.650	4.957.500 11.934.800
1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	21.608.682	25.321.082	29.485.275	73.182.134

1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**100%**	**5.133.795.238**	**13.780.195.008**	**19.061.350.197**	**24.339.442.954**
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.918.381.238	13.192.370.008	18.125.697.197	22.956.121.904
1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pemyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Orang	215.414.000	538.535.000	838.013.000	1.237.317.000
1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		49.290.000	97.640.000	139.106.500
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semestrean SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18			2.981.550	6.897.550
1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**100%**	**25.835.300**	**137.156.830**	**354.080.203**	**689.230.533**
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1		9.914.000	9.914.000	19.909.000
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1				9.998.750
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang DIsediakan	1	14.996.500	35.396.500	78.746.500	128.444.000
1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1		x 37.000.000	63.398.550	99.902.550
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan yang disediakan	1			- 3.762.500	-
1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3.762.500	3.762.500	198.258.653	38.277.500
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	7.076.300	51.083.830		392.698.733

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1			9.914.000	
1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	**100%**		**772.260.000**	**772.260.000**	**878.260.000**
1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1				
1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2		772.260.000	772.260.000	878.260.000
1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	**100%**	**171.469.790**	**398.532.128**	**608.712.374**	**878.098.612**
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
1.08.02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Yang Dibayar	1	146.509.790	273.732.128	408.337.374	577.883.612
1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Yang Disediakan	1	24.960.000	124.800.000	200.375.000	300.215.000
1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	**100%**		**112.365.000**	**224.840.500**	**668.958.800**
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit		85.892.000	182.782.500	330.520.800
1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	10 Unit			8.085.000	39.965.000

1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Paket		26.473.000	33.973.000	298.473.000
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kab/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja**				**9.966.572**	**98.550.795**
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)	Jumlah kab/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja				9.966.572	98.550.795
2.07.02.1.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro				9.966.572	98.550.795
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang Menyusun rencana tenaga kerja**					**43.610.000**
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan kompetensi yang ditempatkan**					43.610.000
2.07.03.1.01.03	Pengadaan sarana pelatihan kerja	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja					43.610.000
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**60%**		**59.641.000**	**94.301.000**	**116.975.452**
04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Pencaker Yang Ditempatkan**	**80%**		**56.347.500**	**60.147.500**	**60.147.500**
1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi Yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1		53.553.000	57.353.000	57.353.000
1.03.03	Job fair / Bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair / bursa kerja			2.794.500	2.794.500	2.794.500
04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan Pembayaran Retribusi Daerah	80%		**3.293.500**	**34.153.500**	**56.827.952**

1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Tahun Daerah Provinsi	Jumlah TKA uang Telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	13 Kab/Kota		3.293.500	34.153.500	56.827.952
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak**	**38%**				**93.632.400**
05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	38 %				**47.105.600**
05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Tripartit Yang Dibina	1				**47.105.600**
05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK**	**1 Dokumen**			**16.523.800**	**46.526.800**
1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1			16.523.800	46.526.800
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Berkurangnya Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan**	**67%**	**8.560.000**	**8.560.000**	**45.931.906**	**125.964.630**
06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan	120	**8.560.000**	**8.560.000**	**45.931.906**	**125.964.630**
1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120			25.786.756	76.023.730

1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permsalahan Hukum yang Diselesaikan	5	900.000	900.000	900.000	4.891.900
1.01.03	Pelayanan keselamatan dan Kesehatan kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	158	7.660.000	7.660.000	19.245.150	45.049.000
3.02	**URUSAN PEMERINTAHAAN BIDANG TRANSMIGRASI**						
3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya**	100%			**28.147.146**	**79.649.533**
32.02.1.01	**Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi**	**Persentase peningkatan penyelesaian pelayanan , pertanahan Kawasan transmigrasi**	100%			**28.147.146**	**79.649.533**
32.02.01.01	Identifikasi potensi Kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi Kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	5			28.147.146	79.649.533
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunanya	1			**15.785.920**	**40.552.310**
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunanya	1			**15.785.920**	**40.552.310**
3.32.03.1.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 lap				
3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Dan / Atau Transmigran Yang Mendapatkan Pelatihan	62 orang				
3.32.03.1.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi dikawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Mampu Menyesuaikan Diri Di Satuan Permukiman Trasnmigrasi	31 orang			8.008.720	25.575.110
3.32.03.1.01.18	Monitoring dan evaluasi ke Lokasi transmigrasi					7.777.200	14.977.200
JUMLAH				**5.367.879.917**	**15.324.235.223**	**21.315.012.475**	**28.200.719.508**

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	47	47	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,55		0
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	80.100.000		0
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peseerta BPJS Ketenagakerjaan)	%	43	42,30	98 %
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	47	62,19	132 %
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	62	64,6	90 %

7	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	0	0	
8	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1		
9	Jumlah satuan permukiman yang dibina	SP	1		

2.3 IDENTIFIKASI MASALAH

2.3.1 Masih tingginya pengangguran terbuka

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan khususnya di bidang ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Penganggur terbuka yaitu golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlahAngkatan Kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya.

2.3.2 Masih tingginya penduduk yang bekerja dibawah 35 jam per minggu

Disamping masalah pengangguran terbuka, Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan dengan masalah setengah penganggur yang tinggi. Setengah Penganggur yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Apabila masalah pengangguran ini terus meningkat dan tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.3 Masih tingginya pengangguran terdidik (Lulusan SMA/SMK dan S1)

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terdididk terutama di daerah perkotaan. Tingkat pengangguran terdidik diartikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut.

2.3.4 Masih tingginya angka kemiskinan

Ketidakmampuan seseorang memen uhi kebutuhan pokok dapat disebabkan oleh pengangguran, yang sering disebut-sebut sebagai

penyebab utama kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim dibandingkan banyaknya jumlah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih).

2.3.5 Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja

Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan tenaga kerja adalah belum optimalnya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lembaga Pengujian K3 yang disebabkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum menjadi budaya kerja di perusahaan dan tingkat kompetensi K3 pekerja masih rendah. Permasalahan lain adalah pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 serta penegakan hukum bidang K3 belum secara efektif dilakukan ke semua perusahaan yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah Perusahaan dan Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang ada.

2.3.6 Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2026

.

Rencana Kinerja Tahun 2026 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat ditunjukan pada Rencana Kinerja 2026 ini.

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan:
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Sasaran

Bidang Ketenagakerjaan:

1. Meningkatnya tingkat kesempatan kerja;
2. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja.

Bidang Ketransmigrasian:

1. Pemantapan transmigran.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target 2026
1	2	3	4
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,77
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.800.000
3	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi		
4	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	36
5	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	50
6	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	72
7	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	0,01

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target 2026
1	2	3	4
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	58
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8,15
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.800.000
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS)	Persen	67
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme	Persen	74
6	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	72
7	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	persen	100
8	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	100

9	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	100
10	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	
11	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	537.920
12	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	537.920

PROGRAM, KEGIATAN DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Setiap sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi, serta berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan adalah aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program, kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada masing - masing program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2026	Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	**33.624.259.000**
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**170.000.000**
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	5.000.000

						Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10,000,000
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,000,000
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya pelayan an administrasi perkantoran	100 Persen	**29.840.859.000**
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang	29.560.579.000
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	65.000.000
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	205.280.000
2	07	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest SKPD dan Laporan Koordi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest SKPD	18 Laporan	10,000,000
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**60.000.000**
2	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000
2	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 Persen**	**360.000.000**
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	250.000.000
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	100.000.000
2	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10.000.000
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**845.000.000**

2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	85.000.000
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani**	**100 Persen**	**550.000.000**
2	07	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000
2	07	01	1.07	08	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	100.000.000
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani**	**100 Persen**	**1.240.000.000**
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Yang Dibayar	1 Laporan	700.000.000
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	540.000.000
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik**	**100 Persen**	558.400.000
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	300.000.000
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Paket	50.000.000

2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	208.400.000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja**	**100 Persen**	**100.000.000**
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**Jumlah Kab/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**	**17 Kab/Kota**	**100.000.000**
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	100.000.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**2,6 Persen**	**740.000.000**
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86.200	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Persentase Peserta Pelatihan Kompetensi yang Ditempatkan**	**35 Persen**	**690.000.000**
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	48 Tenaga Kerja	490.000.000
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1 Kesepakatan	100.000.000
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Paket	100.000.000
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi**	**30 Persen**	**50.000.000**
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	20 LPK	50.000.000
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**	50 Persen	495.000.000
2	07	04	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	70 Persen	220.000.000
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKD,AKL dan ULD	50 Orang	25.000.000
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	175.000.000
2	07	04	1.01	06	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	20.000.000
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase Pencaker Yang Ditempatkan**	**80 persen**	**175.000.000**

2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan MelaluiJob Fair/Bursa Kerja	100 Orang	175.000.000
2	**07**	**04**	**1.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Persentase PMI yang ditempatkan dan mendapatkan perlindungan**	**80 Persen**	**25.000.000**
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	25.000.000
2	**07**	**04**	**1.05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah**	**80 Persen**	**75.000.000**
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Tahun Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	75.000.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak**	43,5 Persen	275.000.000
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas PP dan PKB**	43,5 Persen	75.000.000
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Tripartit Yang Dibina	1 Lembaga	75.000.000
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektroral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektroral**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK**	1 Rekomendasi	200.000.0000
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP	1 Rekomendasi	150.000.000
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50 Orang	50.000.000

2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan**	**75 Persen**	**800.000.000**
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan**	**120 Perusahaan**	**800.000.000**
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120Perusahaan	275.000.000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	220.000.000
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	305.000.000
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya**	**100 Persen**	**25.000.000**
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi**	**100 Persen**	**25.000.000**
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penatapan kawasan transmigrasi	2 Kasus	25.000.000
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang difalisitasi pembangunannya**	**100 Persen**	**245.000.000**
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Meningkatnya Penataan Persebaran Penduduk Wilayah Transmigrasi**	**100 Persen**	**245.000.000**
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	31 Transmigran	75.000.000
3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Mneyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	31 KK	50.000.000
TOTAL								**36.304.259.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026 ini disusun sebagai masukan guna mendukung agenda pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dan memantapkan pelaksanaan kebijakan dan program-program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja ini perlu dijabarkan secara cermat dengan memperhatikan perkembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigran khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Desember 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINISI SUMATERA SELATAN,

H. INDRA BANGSAWAN, SH.,MM
NIP. 19700509 199203 1 001